



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PUSAT STUDI DAN SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telepon (0352) 481124, Faksimile (0352) 461796,
website : www.hukumumpo.ac.id, email: hkiumpo@gmail.com
Akreditasi Institusi oleh BAN-PT – B
(SK BAN-PT No : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

NOMOR PERMOHONAN

EC002025114177

NOMOR SERTIFIKAT

000954438

**EFEKTIFITAS SANKSI HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN KAMPANYE DI MEDIA SOSIAL
DALAM PILKADA**

STATUS

Granted

TANGGAL PENGAJUAN

19-08-2025

JENIS PERMOHONAN

Hak Cipta

TANGGAL PENGUMUMAN

23-05-2025

SKEMA

copyright

DESKRIPSI

Implementasi sanksi hukum terhadap pelanggaran kampanye di media sosial dalam Pilkada merupakan langkah strategis untuk mewujudkan penegakan hukum pemilu yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan efisiensi pengawasan, transparansi informasi, serta keamanan proses kampanye melalui sistem digital yang lebih terintegrasi. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran digital diharapkan mampu meminimalkan risiko manipulasi, disinformasi, serta mempercepat proses penanganan pelanggaran kampanye. Namun, keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada kesiapan regulasi, infrastruktur digital, dan edukasi masyarakat. Payung hukum yang komprehensif diperlukan agar pengakuan terhadap bukti digital berlaku sah dan mengikat dalam seluruh proses hukum, termasuk penyelesaian pelanggaran kampanye. Harmonisasi antar peraturan juga menjadi hal yang penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan. Selain itu, kesiapan kelembagaan, keamanan sistem informasi, serta pemerataan akses dan literasi digital di kalangan masyarakat juga perlu diperhatikan. Sosialisasi yang masif dan berkelanjutan akan membantumasyarakat memahami batasan sertakonsekuensi hukum dari aktivitas kampanyedigital, sehingga tidak terjadi kesenjanganinformasi. Dengan pendekatan yang menyeluruh, penerapan sanksi atas pelanggaran kampanye di media sosial dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik,serta mendukung pelaksanaan Pilkada yang demokratis, adil, dan inklusif.

DATA PEMEGANG

Nama	Kewarganegaraan
Universitas Muhammadiyah Ponorogo	Indonesia

DATA PENCIPTA

Nama	Kewarganegaraan
Tri Winarno, Dr. Ferry Irawan Febriansyah, M.Hum, Dr. Yogi Prasetyo S.H. M.H.	Indonesia